

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawasan perkaderan adalah proses yang perlu dilaksanakan agar bisa melanjutkan perkembangan suatu organisasi nantinya, pengawasan dilakukan agar proses perkaderan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Ada beberapa hal yang dilakukan agar pengawasan berjalan efektif yaitu: pertama, dengan menjaga kualitas kader, pengawasan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kader yang akan diterima memiliki kualitas yang baik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh HMI. Kedua, menjaga ideologi dan nilai HMI, lewat pengawasan bisa memastikan bahwa proses perkaderan tidak melenceng dari ideologi dan nilai dasar HMI. Ketiga, mencegah penyimpangan, dengan pengawasan dapat membantu mencegah penyimpangan dalam proses perkaderan seperti penyalahgunaan dana dan pelanggaran kode etik.

Menurut pendapat Victor M. Situmorang¹ dan Jusuf Juhir pengertian pengawasan yaitu usaha yang harus dilakukan dalam bentuk tindakan mengawasi ke lapangan agar bisa mengetahui sudah sejauh mana pelaksanaan tugas yang diberikan apakah sudah sesuai dengan target yang

¹ Ervin Alexander Aritonang, 'Pengawasan Terhadap Aktivitas Organisasi Kemasyarakatan Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan', 2016, hal. 1-2.

ingin dicapai. Pendapat Sondang P. Siagian² pengawasan merupakan reaksi pengawasan dari pelaksanaan kegiatan didalam organisasi tersebut agar sesuai dengan rencana yang sudah disepakati sebelumnya.

Pengawasan (*controlling*) merupakan proses untuk melacak kegiatan untuk memastikan apakah sudah sesuai dengan rencana awal atau tidak, jika hasilnya tidak sesuai maka dilakukan pengulangan pengawasan dengan memperbaiki kesalahan agar sesuai dengan rencana.

Pengawasan adalah hal yang paling penting dalam berbagai organisasi dimulai dari *planning*, *organizing*, *actuating* sampai *controlling*, pengawasan yang dilakukan oleh organisasi sangat jelas berpengaruh terhadap meningkatkan usaha organisasi secara menyeluruh. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan agar menghindari dari kesalahan. Tujuan dari pengawasan ini untuk menyelaraskan gerak dari suatu organisasi dengan rencana awal (*planning*), dalam melaksanakannya perlu memperhatikan apa saja syarat dan prinsip penting sesuai dengan fungsi yang diharapkan.

Pengawasan (*controlling*) memiliki maksud yang sama dalam bahasa arab yaitu kata *ar-riqobah*. Dalam ayat ini menunjukkan tentang adanya sebuah fungsi dari pengawasan yang paling penting yaitu pengawasan dari Allah SWT, berikut ayat tersebut diantaranya:

²ibidh, h. 3.

QS. An-Nisa[4]:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ كَمَا الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالرَّحْمَنَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (Q.S 4:1)

Kesimpulan dari pengertian pengawasan ayat diatas memiliki hubungan yang sama antara pengawasan dan perencanaan, pengawasan dapat menggambarkan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan dan hasil yang ingin dicapai.

Pengawasan merupakan hal yang penting didalam unsur pengawasan jika dalam sebuah organisasi tidak ada pengawasan maka tugas tidak dapat berjalan sesuai dengan perencanaan awal mulai dari waktu yang tidak sesuai. Organisasi sangat memerlukan sebuah pengawasan agar bisa melihat bagaimana kemampuan untuk mencapai keberhasilan menjadi sebuah tolak ukur sudah sejauh mana pelaksanaan pengawasan dalam organisasi tersebut.

Menurut Saiful anwar pengawasan merupakan sebuah tindakan atau pengendalian dari aparatur pemerintah dalam menyelesaikan tugas yang

diberikan untuk menghindari kesalahan. Menurut M.Manullang³ mengatakan bahwa ‘‘pengawasan adalah menilai suatu proses dengan tujuan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana awal’’. Disimpulkan bahwa pengawasan memiliki tujuan agar suatu kegiatan atau pekerjaan dapat dikontrol dan dikoreksi sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan dalam kegiatan atau pekerjaan tersebut. Pengawasan juga dapat mengetahui sejauh mana pelaksanaan organisasi yang sudah terlaksana.

Pengawasan atau *controlling* mempunyai persamaan kata dalam Bahasa arab yaitu *ar-riqobah*. Kata ini terdapat di dalam al-qur’an yang menunjukkan bahwa adanya fungsi pengawasan dari Allah SWT, ayat tersebut terdapat dalam QS. Al-Hasyr:18:

لَحِيبُ الْوَلِيِّ هُوَ ۖ مَوْلَاكَ مَا هَلَّا أَمْ هُنَّ فَاعْلَمُوا تَوَلَّيْهُ
وَإِنْ

Artinya :

“Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah adalah Pelindungmu. Dia adalah Pelindung yang Maha Baik dan Maha Terpuji.”

Kesimpulan dari penjelasan ayat tersebut Allah SWT adalah pelindung bagi orang-orang beriman. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT selalu mengawasi dan menjaga orang-orang beriman, termasuk dalam hal perkaderan.

Dalam sebuah organisasi perkaderan sangat dibutuhkan untuk melahirkan para penerus dari organisasi tersebut, untuk menghasilkan kader

³ Yunianggraeni, ‘Pengawasan Orangtua Dalam Penggunaan Gadget Di RA Yapsisumberjaya Lampung Barat’, 2019.

yang berkualitas berkaitan dengan pengawasan yang berfungsi untuk meninjau sudah sejauh mana perkembangan kader yang sudah dibina melalui pola pembinaan pengelola latihan yang dasarnya digunakan untuk menerapkan kreatifitas kader, model yang dikembangkan oleh Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (BPL HMI) disusun sesuai dengan standar melalui tiga bentuk operasional yaitu formal (pendidikan), informal (aktivitas), dan non formal(jaringan kerja). Tujuan disusunnya pola pembinaan pengelola latihan agar seluruh usaha yang dilakukan oleh anggota kader BPL HMI dapat terwujud melalui peningkatan kualitas dan kuantitas, sikap dan konsisten melalui perjuangan.

Perkaderan HMI merupakan program untuk menyebarkan dan memahami kebenaran dan nilai-nilai islam dikalangan generasi muda, karakter generasi muda yang memiliki integritas untuk membangun indonesia yang lebih baik. Pelatihan kader bagi HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) cabang Padang yakni pelatihan yang paling mendasar yang harus selesai oleh mahasiswa yang menjadi anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam). Oleh karena itu, pelatihan perkaderan harus dilaksanakan agar menjadi organisasi kemahasiswaan terbesar dan bisa menyelesaikan kendala masalah secara bersama-sama⁴.

⁴ Yoyon. S Nurul. H, 'Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat.', *JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat)*, 4.2 (2017), 7–9

Berdasarkan wawancara pada ketua umum Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (BPL HMI) ditemukan bahwa semua peserta Latihan Kader 1 seluruh mahasiswanya beragama islam. Menurut Rusma dalam Rafni model pendidikan yang digunakan untuk Latihan Kader ini berupa Aktivitas organisasi, latihan kader dan *follow up*, pendidikan formal pada LK 1 berupa pendidikan politik nonformal berupa kegiatan dalam organisasi HMI⁵.

Fungsi pengawasan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah untuk mengawasi jalannya kegiatan perkaderan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (BPL HMI) sesuai dengan standar, tujuan dilaksanakan pengawasan perkaderan ini untuk mengetahui bagaimana sistem perkaderan yang dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Kegiatan perkaderan yang dilakukan oleh Badan pengelola Latihan Himpunan Mahasiswa Islam (BPL HMI) memiliki pola pembinaan pengelola latihan yang dasarnya merupakan sumber yang digunakan sebagai pelaksanaan secara professional aktifitas serta kreatifitas kader dengan pola pembinaan terpadu. Model pembinaan yang dikembangkan oleh BPL HMI disusun secara sadar, berkesinambungan, sistematis, dan progresif dalam rangka penataan diberbagai ruang lingkup kelembagaan

⁵Fadli Ilham, Hasrul Hasrul, and Susi Fitria Dewi, 'Model Pendidikan Politik Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Padang', *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 12.1 (2020), 109.

dengan tiga bentuk operasional yakni model formal (pendidikan), informal (aktivitas), dan model non formal (jaringan kerja/*network*).

Menurut Ulbert Silalahi dalam bukunya tentang ilmu administrasi (Konsep, Teori dan Dimensi) pengawasan terbagi dalam 2 kategori yaitu:

1. Pengawasan *preventif*

Pengawasan *preventif* merupakan pengawasan yang memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau penyimpangan agar bisa mengurangi terjadinya tindakan pengawasan *korektif*.

2. Pengawasan *korektif*

Pengawasan *korektif* bertujuan untuk bisa mengubah sebuah kesalahan agar menghasilkan kinerja yang dapat sesuai dengan standar yang berlaku⁶.

Pengawasan *preventif* yaitu pelaksanaan pengawasan sebelum dilaksanakan kegiatan yang berfungsi agar kegiatan yang akan dilaksanakan bias terhindar dari penyimpangan atau kesalahan yang akan terjadi.

Permasalahan yang terjadi setelah lulus *Basic Training 1* (LK 1) yaitu sebagian dari para calon kader tidak aktif, mereka yang aktif pun bisa

⁶Lusi Mardiana Sari, *Pengawasan Baznas terhadap Program Dharmasraya makmur di Kabupaten Dharmasraya*, Skripsi Sarjana Sosial, (Padang: Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, 2019), h. 31

belajar dengan senior untuk menambah ilmu, dan juga kader HMI juga kurang memahami karakter islam dan kebangsaan, sebagian kader HMI tidak bisa bertanggung jawab dengan kewajiban akademiknya, sehingga muncul kemunduran dari internal HMI. Tujuan HMI sangat diharuskan untuk memiliki karakter ke-Islaman⁷.

Program *Basic Training* (LK 1) merupakan awal dimulainya HMI, program *Basic Training* (LK 1) harus bisa dipelajari dengan serius dan bertanggung jawab. Secara menyeluruh kader HMI Cabang Padang mempunyai beberapa tingkatan dimulai dengan training formal yaitu *Basic Training* (LK1), *Intermediate Training* (LK II), *Advance Training* (LK III). Hal yang dipelajari pada *Basic Training* (LK 1) yaitu pemahaman akan nilai Islam dan nilai kebangsaan. Hal yang dipelajari pada *intermediate Training* (LK II) yaitu pendalaman materi yang melatih kemampuan dalam hal kepemimpinan dan menganalisis. Hal yang dipelajari pada *Advance Training* (LK III) yaitu tingkat yang paling tinggi dalam perkaderan yang berfokus dengan mengasah jiwa kepemimpinan yang lebih kompleks dan menerapkan langsung kepada masyarakat. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mempunyai tujuan agar calon kader nantinya bertanggung jawab agar bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang intinya

⁷Wawancara dengan Oktavia Sentia, 06 Maret 2024 di Wisma HMI

menjaga kerukunan bangsa. Jika terjadi permasalahan maka kader HMI harus turun untuk membela umat dengan nilai kebangsaan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis dapat memahami pengawasan *preventif* merupakan pengawasan yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan agar dapat menghindari kemungkinan kesalahan dalam menyusun rencana. Sedangkan pengawasan *korektif* dilaksanakan setelah kegiatan agar bisa menjadi pembanding. Penerapan fungsi pengawasan *prevantif* dan *korektif* penting dilaksanakan agar kegiatan dalam organisasi dapat berjalan dengan efektif sehingga tercapainya tujuan organisasi.

Perkaderan HMI adalah hal yang penting dalam organisasi karena dengan pelaksanaan perkaderan dapat menghasilkan individu yang memiliki kualitas akademis yang amanah agar tercapainya tujuan organisasi. BPL di HMI sifatnya hanya membantu yang memiliki tugas, wewenang serta tanggung jawab yang berat di HMI. Tantangan yang biasa dihadapi oleh kader HMI dengan bagaimana berada ditengah generasi milenial karena karakteristik generasi milenial sendiri yaitu apatis hingga individual.⁸

Berdasarkan latar belakang, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian secara berfokus dengan judul: “Pengawasan

⁸HMI sebagai organisasi perkaderan.

perkaderan oleh Badan Pengelola latihan Himpunan Mahasiswa Islam (BPL HMI) cabang padang.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Rumusan masalah yang akan penulis lakukan untuk penelitian mengenai: “Pengawasan perkaderan oleh BPL HMI cabang Padang”. Karna begitu umum mengenai pengawasan perkaderan maka penulis membatasi penelitian ini dengan beberapa petunjuk yang sesuai dengan penelitian, tujuan dari pembatasan permasalahan yaitu agar bisa mendapatkan inti dari pokok permasalahan. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menguraikan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Pengawasan *preventif* dilihat dari aspek Materi, Metode, Media pada BPL HMI Cabang Padang
2. Pengawasan *korektif* dilihat dari aspek Materi, Metode, Media pada BPL HMI Cabang Padang

C. Tujuan Penelitian

Hal yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pengawasan *preventif* perkaderan dilihat dari aspek Materi, Metode, Media pada BPL HMI Cabang Padang
2. Untuk mengetahui proses pengawasan *korektif* perkaderan dilihat dari aspek Materi, Metode, Media pada BPL HMI Cabang Padang

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil dan manfaat yang baik diantaranya:

1. **Kegunaan Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai pengawasan bagi jurusan manajemen dakwah dengan pertimbangan ilmu dakwah

2. **Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian diharapkan bisa menjadi tambahan untuk kemajuan pelaksanaan perkaderan bagi lembaga dan organisasi BPL HMI cabang Padang, serta bisa meningkatkan efektivitas pengawasan untuk bisa meningkatkan kader yang lebih berkualitas.

F. Penjelasan Judul

Untuk penjelasan istilah yang digunakan pada penulisan ini agar terhindar dari kesalahpahaman pada penelitian. Maka istilah tersebut antara lain :

Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi dari manajemen yang sangat perlu dilakukan baik disebuah organisasi karena pengawasan dilakukan agar mengetahui lebih awal apakah ada permasalahan yang besar, dilaksanakannya pengawasan agar kita bisa mengetahui lebih dini apakah

sesuai dengan rencana awal sehingga jika ditemukan masalah dapat diperbaiki⁹. Pengawasan merupakan hal penting dalam suatu organisasi, tindakan yang dilakukan dengan mengawasi langsung ke lapangan yang berfungsi untuk melihat sudah sejauh mana pelaksanaan tugas yang diberikan. Tujuan dari pengawasan yaitu menghindari kesalahan pada pelaksanaan kegiatan.

Perkaderan

Perkaderan adalah tahap untuk membentuk sebuah pemikiran dan perilaku. Dan proses dari perkaderan itu sendiri melalui pembinaan untuk semua para kader yang mempunyai wawasan yang luas dan memiliki pengaruh yang besar untuk berkembangnya suatu organisasi, salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan zaman melalui perkaderan agar bisa menciptakan tindakan aktif untuk setiap masyarakat¹⁰.

Kaderisasi merupakan hal penting dalam suatu organisasi karena hal tersebut penting untuk kelanjutan perjuangan organisasi dengan melaksanakan tugas keorganisasiannya dengan baik, fungsi kaderisasi adalah untuk mempersiapkan generasi baru yang siap melanjutkan perjuangan organisasi. Kader organisasi merupakan orang yang telah dipersiapkan dengan disiplin ilmu agar memiliki kemampuan yang diharapkan.

⁹Eko Putra, 'Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt.Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan', *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12.1 (2015), 54–67.

¹⁰Saidatul Hilmiyah, 'Manajemen Perkaderan Organisasi Ikatan Pelajar Putri Dalam Membangun Kepemimpinan', 5.3 (2019), 1–3.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas,dapat disimpulkan yang penulis gunakan sebagai sistematika penulisan proposal sebagai berikut:

BAB I : Bab ini menjelaskan uraian berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menjelaskan landasan teori yang berisikan kajian kepustakaan mengenai penertian pengawasan, langkah-langkah pengawasan, jenis pengawasan dan tujuan pengawasan, pengertian perkaderan, penjelasan organisasi HMI.

BAB III : Bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, terakhir teknik analisis data.

BAB IV : Bab ini berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan

BAB V : Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran